

# **ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI PENGENDALIAN BIAYA PADA PUSAT BIAYA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nurhayati, Dr. Hj. Anis Rachma Utary, M.Si., Ak., CA and Ibnu Abni Lahaya, SE., M.SA

Faculty Of Economis and Business, Mulawarman University

([Nurhayati020596@gmail.com](mailto:Nurhayati020596@gmail.com))

## **ABSTRACK**

Nurhayati. Analysis of Responsibility Accounting System as Cost Control for Cost Centre of Human resources Development agency (BPSDM) of East Kalimantan Province

The Purpose of this research is to analyze the Responsibility Accounting System of Human Resources Development agency (BPSDM) whether it was appropriate whit theory konsep. Type of this research was descriptive empirical and it used Internal Control Questionnaires (ICQ) analyze technique.

The result of this research showed that human resources development agency Province of East Kalimantan had applied Responsibility Accounting System. (1). The government has applied organizational system that spilt authority and responbility in very management. (2). The government had compiled budget based on responsibility.(3). The government had not classified get control and uncontrol cost.(4). Accounting system had suitable with organizational structure. (5). Reporting Sytem had dine by the low leader. But there were differences abont cost responsibility accounting system that had been done by Human resources developoment agency with Cost Control System based of accounting theory.

**Keywords:** Responsibility Accounting, Cost Control, Cost Center.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang meliputi segala bidang bidang. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan selaras, seimbang,dan menunjang antara bidang satu dengan bidang yang lain, sehingga tidak terjadi kesenjangan. Pembangunan bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini ditujukan untuk memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sendiri, penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat, sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan

prinsip keterbukaan, prinsip masyarakat dan wajib melaksanakan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam suatu organisasi, baik perusahaan swasta maupun pemerintah di dorong untuk memberikan output (keluaran) yang maksimal, hal tersebut sangat diperlukan dalam suatu badan usaha untuk menggunakan pengendalian biaya. Pengendalian biaya adalah bagaimana manajemen mengambil tindakan dalam mengarah aktivitas yang sedang dilaksanakan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan, suatu proses pengendalian haruslah melalui beberapa prosedur seperti menetapkan standar (anggaran) yang dijadikan sebagai tolak ukur, mencatat hasil atas realisasi, serta melakukan perbandingan antara pelaksanaan hasil realisasi dengan standar-standar yang telah ditetapkan (Hafidz,2007).

Perencanaan dan pengendalian merupakan salah satu indikator yang dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu setiap kegiatan usaha perlu adanya perencanaan dan pengendalian yang baik guna mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Perencanaan dan pengendalian adalah sebuah informasi yang menjadi alat penilai kinerja suatu organisasi (Pasaribu,2013).

Salah satu cara pengendalian biaya yang termasuk baik untuk diterapkan adalah sistem akuntansi pertanggungjawaban yang mana setiap pemerintah daerah mempertanggungjawaban yang dilaporkan sesuai dengan bidang dan fungsinya. Pengendalian biaya melalui sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan alat yang digunakan untuk melaporkan bagaimana setiap manajer tiap-tiap unit pusat pertanggungjawaban dapat mengatur pekerjaan yang berada langsung dibawah pengawasan dan tanggungjawabnya.

Setiap pusat pertanggungjawaban diberi wewenang untuk menyusun anggaran biaya yang disetujui oleh kepala puncak pada periode tertentu masing-masing pusat pertanggungjawaban membuat laporan pertanggungjawaban, laporan ini harus menjelaskan pelaksanaan penggunaan anggaran dan realisasinya serta penyimpangan sistem akuntansi pertanggungjawaban sehingga segera dapat menelusuri secara cepat pusat pertanggungjawaban dan dapat diambil tindakan perbaikan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai salah satu pemerintah daerah yang bergerak dibidang jasa usaha dan jasa umum. Dimana salah satunya kesulitan yang dialami adalah terdapat keperluan mendadak seperti halnya honor instruktur. Dalam honor instruktur terdapat pada masalah administratif dan lemahnya persiapan saat pembukaan diklat seperti halnya kurang perincian biaya pada saat awal kegiatan tersebut. Sehingga pimpinan tidak dapat melakukan pengawasan dan pengendalian biaya-biaya yang terjadi. Kesulitan itu timbul karena pimpinan tidak dapat secara langsung mengikuti jalannya suatu kegiatan, sedangkan transaksi semakin banyak dan bermacam-macam.

Berdasarkan uraian diatas, sistem akuntansi pertanggungjawaban dirasakan penting karena dapat membantu manajemen pusat pertanggungjawaban dalam melakukan pengawasan terhadap pengendalian biaya pada pusat biaya dalam suatu pemerintahan, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Analisis Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban

Sebagai Pengendalian Biaya Pada Pusat Biaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Akuntansi Manajemen**

Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) melalui Halim dan Supomo (2013:2) memberikan definisi akuntansi manajemen sebagai berikut :“Akuntansi manajemen sebagai proses pengidentifikasi, pengukuran, pengakumulasi, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasikan, dan pengkomunikasikan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akurat”.

### **2. Akuntansi Biaya**

Menurut Mulyadi (2014:7) memberikan pengertian akuntansi biaya sebagai berikut :“Akuntansi Biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya.”

### **3. Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali**

Menurut Daljono dalam Athena (2010:37) mendefinisikan bahwa biaya terkontrol dan biaya tidak terkontrol adalah sebagai berikut : “Biaya dimana manajer dapat mempengaruhi ada tidaknya dan besarnya biaya tersebut. Apabila seorang manajer tidak dapat mempengaruhi suatu biaya melalui kebijakannya, maka biaya tersebut merupakan biaya tidak terkontrol bagi manajer tersebut.”

### **4. Sistem Akuntansi**

Menurut Krismiadji (2010:4) menyatakan bahwa sistem akuntansi sebagai berikut :“Sistem Akuntansi terdiri dari atas metode dan catatan yang diterapkan untuk mendefinisikan, merangkai, menganalisis, menggolongkan, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi yang ada dalam suatu organisasi dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan kewajiban yang terkait.”

### **5. Klasifikasi dan Kode Rekening**

Menurut Thomas (2013:38) menjelaskan kode rekening adalah sebagai berikut : “Pemberian kode untuk klasifikasi rekening diperlukan karena dapat memudahkan untuk mencari rekening-rekening yang diinginkan.”

### **6. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban**

Menurut Simamora (2012:229) mendefinisikan akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :“Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem pelaporan informasi yang mengklasifikasikan data finansial menurut bidang-bidang pertanggungjawaban didalam sebuah organisasi dan melaporkan berbagai aktivitas setiap bidang dengan hanya menyertakan kategori-kategori pendapatan dan biaya yang dikendalikan oleh manajer yang bertanggungjawab.”

## 7. Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen

Menurut Anthony & Govindarajan (2009:418), menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen sebagai berikut :“Sistem pengendalian manajemen merupakan cara tertentu untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan suatu organisasi.”

## 8. Pengertian Organisasi

Menurut Siswanto (2005:73) organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut : “Organisasi adalah sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama”.

## 9. Pengertian Anggaran

Menurut William (2009:13) mengatakan bahwa anggaran mengatakan bahwa:“Anggaran adalah pernyataan yang terkuantifikasi dan tertulis dari rencana manajemen yang seluruh tingkat manajemen sebaiknya terlibat dalam membuatnya.”

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang terletak di Jl. H.A.M.M Riffadin Samarinda Seberang. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian ini maka diperlukan data sebagai berikut :

1. Gambaran umum dan Struktur Organisasi BPSDM tahun 2015
2. Data biaya dan penggolongan biaya tahun 2015
3. Data anggaran dan realisasi anggaran biaya tahun 2015
4. Data klasifikasi kode rekening tahun 2015
5. Data lain yang diperlukan untuk mendukung dalam penulisan ini

## ANALISIS DATA

Penulis untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya yang terjadi pada BPSDM dilakukan dengan menggunakan alat analisis adalah *Internal Control Questionnaires (ICQ)*. *Internal Control Questionnaires (ICQ)* berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai persyaratan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban menurut Sofyan (2001:67-80) yang menjadi acuan pembuatan ICQ adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki Struktur organisasi yang baik, struktur organisasi yang baik artinya memiliki batasan terhadap wewenang dan tanggungjawab yang jelas dan tegas sehingga setiap bagian dengan bagian lain tidak tersinggung.
- b. Dalam akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya, harus terdapat pemisahan antara biaya yang dapat dikendalikan (*controllable*) dengan yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh manajer puncak pertanggungjawaban yang bersangkutan.
- c. Anggaran atau *budget* harus disusun menurut pusat-pusat pertanggungjawaban.
- d. Memiliki sistem akuntansi yang sejalan dan disesuaikan dengan pusat pertanggungjawaban yaitu klasifikasi dan kode rekening dalam akuntansi pertanggungjawaban.
- e. Sistem pelaporan biaya sebagai proses pengendalian biaya pada akuntansi pertanggungjawaban harus ada akibat baik berupa penghargaan (*reward*) maupun penalti sebagai akibat prestasinya sesuai dengan ukuran tanggungjawab.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Analisis struktur organisasi**

**Tabel 4.1**  
**Analisis Struktur Organisasi**

<b>Unsur-unsur</b>	<b>Teori</b>	<b>Hasil temuan</b>	<b>Sesuai/Tidak sesuai</b>
Pusat-pusat pertanggungjawaban	Adanya pusat pertanggungjawaban yang jelas.	Telah memiliki struktur organisasi yang menetapkan wewenang dan tanggungjawab	Sesuai
Hirarki	Terdapat hikarki vertikal maupun horizontal	Terdapat sistem desentralisasi	Sesuai

Dilihat pada tabel 4.1 struktur organisasi telah memenuhi sistem akuntansi pertanggungjawaban, yaitu struktur organisasi yang terdiri atas pusat-pusat pertanggungjawaban dan terdapat desentralisasi dan wewenang didalamnya.

**Analisis penyusunan anggaran**

**Tabel 4.2**  
**Analisis**  
**Penyusunan Anggaran**

<b>Unsur-unsur</b>	<b>Teori</b>	<b>Hasil temuan</b>	<b>Sesuai/Tidak sesuai</b>
Penyusunan anggaran	Dilaksanakan untuk setiap tingkatan manajemen	Terdapat penyusunan anggaran biaya untuk tingkat manajemen	Sesuai
Proses penyusunan anggaran	Melibatkan setiap tingkatan manajemen	Melibatkan setiap bagian dalam organisasi yaitu kepala badan, sekretaris, kasubag sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, kasubag kelembagaan kompetensi teknis, kasubag kompetensi manajerial dan fungsional	Sesuai

Dilihat pada tabel 4.2 dalam penyusunan anggaran telah memenuhi sistem akuntansi pertanggungjawaban, karena dalam menyusun anggaran setiap pusat pertanggungjawaban ikut berperan didalamnya.

### Analisis biaya terkendali dan biaya tidak terkendali

**Tabel 4.3**  
**Analisis**

#### **Penggolongan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali**

<b>Unsur-unsur</b>	<b>Teori</b>	<b>Hasil temuan</b>	<b>Sesuai/Tidak sesuai</b>
Pemisahan biaya	Terkendalikannya biaya atau tidak dikendalikannya biaya	Belum melakukan penggolongan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali	Tidak sesuai
Pembebanan biaya	Hanya biaya terkendali saja yang di kendalikan setiap pimpinan atau kasubag	Pembagian biaya pada BPSDM berdasarkan pada tingkat jabatan yang ada, sehingga kurang menjamin keakuratan/ketepatan pembebanan biaya yang ada.	Tidak sesuai

Pada tabel 4.3 dilihat bahwa dalam hal penggolongan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali tidak memenuhi sistem akuntansi pertanggungjawaban hal ini disebabkan karena tidak adanya biaya terkendali dan biaya tidak terkendali.

### Analisis sistem akuntansi biaya yang disesuaikan dengan struktur organisasi

**Tabel 4.4**  
**Analisis**

#### **Sistem akuntansi biaya yang disesuaikan dengan struktur organisasi**

<b>Unsur-unsur</b>	<b>Teori</b>	<b>Hasil temuan</b>	<b>Sesuai/Tidak sesuai</b>
sistem pelaporan biaya	Dilaporkan kepada pimpinan yang bertanggungjawab	Diadakan laporan kepada pimpinan yang bertanggungjawab dari setiap unitnya.	Sesuai
Format laporan	Adanya keterangan besarnya anggaran realisasi dan penyimpangannya	Berupa nota-nota dan bukti memorial lainnya serta laporan anggaran, realisasi serta selisih biayanya.	Sesuai

Pada tabel 4.4 dilihat bahwa sudah melaksanakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Dengan penerapan kode rekening angka kelompok dapat dengan mudah mengetahui pusat pertanggungjawaban siapa yang bertanggungjawab terhadap biaya tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Struktur organisasi yang terdapat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur sudah terdapat pusat-pusat pertanggungjawaban dan sudah dapat desentralisasi wewenang didalamnya. Sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih antara wewenang dan tanggungjawab serta dapat bertanggungjawab atas aktivitas masing-masing pusat pertanggungjawaban.
- b. Proses penyusunan anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Samarinda mengikut sertakan para kasubag pelaksana anggaran. Dengan demikian para kasubag ikut berperan dalam serta dalam penyusunan anggaran, sehingga para kasubag merasa bertanggungjawab dengan anggaran yang mereka susun.
- c. Penggolongan biaya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Tetapi berdasarkan pemisahan belanja yaitu belanja langsung, belanja tidak langsung, dan belanja modal. Pengendalian biaya yang ada dalam Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) berdasarkan anggaran yang disusun, dimana realisasi biaya tidak melebihi jumlah biaya yang dianggarkan. Sehingga pengendalian biaya yang terjadi kurang baik karena bila terjadinya penyimpangan biaya sulit diketahui siapa siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya biaya tersebut.
- d. Kode rekening yang digunakan dalam Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) adalah kode kelompok, sehingga biaya yang terjadi langsung diidentifikasi kepada pusat biaya yang bersangkutan.

### **Saran**

1. Sebaiknya pemerintah melakukan pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali agar dapat diketahui mana yang bertanggungjawab apabila terdapat penyimpangan biaya terhadap pengendalian biaya pada pusat biaya.
2. Dalam melakukan perencanaan biaya yang akan dilakukannya sebaiknya diperhitungkan dengan baik, agar anggaran yang disusun tersebut tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar.
3. Pimpinan sebaiknya melakukan analisis dan koreksi terhadap penyimpangan biaya yang ada.
4. Apabila ada suatu kegiatan baru muncul dan tidak dianggarkan sebelumnya sebaiknya diadakan rapat untuk melakukan revisi terhadap anggaran

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamaruddin, 2005. *Akuntansi Manajemen, Dasar-Dasar Konsep, Biaya, dan Pengambilan Keputusan*, Edisi Satu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anthony & Govindarajan, 2009. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jilid Kedua, Salemba Empat. Jakarta.
- Adharawati, Athena. 2010. *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya pada PT. Pelni Kantor Cabang Makassar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang, <http://eprints.undip.ac.id/22552/1/atena.PDF>, diakses tanggal 9 November 2013. Hal 1-117.
- Baridwan, Zaki, 2004. *Intermediate Accounting*, Edisi ketujuh, Cetakan Keempat, Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.
- Bustami dan Nurlela, 2007. *Akuntansi Biaya: Teori dan Aplikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Carter, William K., 2009. *Akuntansi Biaya, Cost Accounting*, Jilid Satu, Edisi Keempatbelas, Salemba Empat, Jakarta.
- Garrison & Noreen. 2000. *Managerial Accounting*, Ninth Edition, United States of America : McGraw Hill Companies.
- Halim, Abduldand Bambang Supomo, 2013. *Akuntansi Manajemen*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, BPFE-Yogyakarta.
- Hansen, dan Mowen. 2009. *Akuntansi Manajerial*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hansen and Women, 2005. *Management Accounting*, Seventh Edition, Thomson Trade Mark, South Western.
- Hansen dan Women, Maryanne, 2000. *Akuntansi Manajemen*, Jilid Satu, Erlangga.
- Horgen, Charles, Foster, George, 2005. *Cost Accounting, A Manajerial, Emphasis*, Jilid Satu, Edisi Sebelas, Indeks Komplek Gramedia, Jakarta.
- Krismiadi, 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, UPPAMP YKPN, Yogyakarta.
- Moore, Carl L., Jaedicke, Andersen, 2002, *Managerial Accounting*, 15 ed, South Western Publishing Co, Cincinnati Ohio.

- Mulyadi, 2014. *Akuntansi Biaya*, Edisi Kelima, Cetakan Keduabelas, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN-Yogyakarta.
- Mulyadi, 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Jakarta, Salemba Empat.
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi, 2001. *Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Edisi Tiga, Bagian Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Masniah, 2009. *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pada PT. Karwokarya Wismah Graha*, E-Jurnal, Universitas Maritim Raja Ali, Tanjungpinang.
- Ni Made Pradnantha, 2013. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Efektifitas Pengendalian Biaya*, E-jurnal, Universitas Udayana, Bali.
- Robbin et al, 2008. *Perilaku Organisasi*, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Rudianto, 2009. *Penganggaran Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran*, Cetakan PT. Gelora Aksara Pratama, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- StevySigar dan InggrianiElim, 2014. *Penerapan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pada PT. Bank Sulut Cabang Tondano*, E-Jurnal EMBA, Fakultas EkonomidandanBisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado, diaskes tanggal 01 Maret 2014, Vol. 2, No.1. Hlm. 499-509
- Sofyan, Herman, 2007. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Supriyono, 2014. *Akuntansi Biaya 1 Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok*, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapanbelas, BPFE-Yogyakarta.
- Supriyono, 1999. *Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen Untuk Teknologi Maju dan Globalisasi*, BPFE, Yogyakarta.
- Sule dan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama, Penerbit kencana, Jakarta.
- Sukirno, 2005. *Evaluasi Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Program Diploma III Wates*, E-Jurnal Universitas Negeri. Yogyakarta.
- Samryn, L.M, 2001. *Akuntansi Manajerial : Sebuah Pendekatan Replikasi*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Waygandt, Keiso, Kell 1996. *Accounting Principle*, Fourth Editio, John Wiley and Sons Inc, Canada.